

**PENGARUH PENGAWASAN, AKUNTANBILITAS,
KETEPATAN WAKTU DAN TRANSPARANSI
KEUANGAN TERHADAP KINERJA BPKAD
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Nama : PIPINTASARI

Nim : 222019149

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2023

SKRIPSI

**PENGARUH PENGAWASAN, AKUNTABILITAS,
KETEPATAN WAKTU, DAN TRANSPARANSI
KEUANGAN TERHADAP KINERJA BPKAD
KOTA PALEMBANG**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : PIPINTASARI

Nim : 222019149

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: PIPINTASARI

NIM: 222019149

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis

Konsentrasi: Akuntansi Sektor Publik

Program Studi: Akuntansi

Judul Skripsi: Pengaruh, Pengawasan, Akuntabilitas, Ketepatan Waktu, Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja BPKAD Kota Palembang

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana Strata 1 baik di Universitas Muhamadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini



Palembang, Juni 2023

PIPINTASARI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, Ketepatan Waktu, Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja BPKAD Kota Palembang

Nama : PIPINTASARI
Nim : 222019149
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

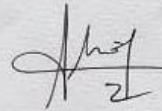
Diterima dan disahkan
Pada tanggal, Agustus 2023

Pembimbing I



Muhammad Fahmi. SE.MSi, ACPA
NIDN/NBM:0029097804/119277

Pembimbing II



Anggrelia Afrida. S.E.,MSI
NIDN/NBM:0218048403/1187 168

Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri Sirajuddin, S.E., AK.M., Si.CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

Skripsi ini ku persembahkan

Kepada:

- ❖ Kedua Orang Tua dan Saudaraku
- ❖ Dosen Pembimbingku
- ❖ Diriku Sendiri
- ❖ Almamaterku

PRAKATA



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh, Pengawasan, Akuntabilitas, Ketepatan Waktu, Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja BPKAD Kota Palembang” sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam.

Penulis merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara materiil maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda (Sairi) dan Ibunda (Naida) tercinta yang merupakan motivator dalam hidupku dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membimbing serta membiayai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan studi.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, arahan, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr Yudha Mahrom, DS, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., AK., C.A, selaku Ketua Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Fahmi. SE.MSi, ACPA., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anggrelia Afrida. S.E., MSI., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar membimbing, mendidik dan memberikan arahan serta masukan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah membekali ilmu, sehingga pengetahuan penulis meningkat, serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Saudara-saudaraku Linda, Titik, Della, dan Aldo yang telah memberikan semangat selama proses mengerjakan skripsi ini
7. Sahabat seperjuanganku Shelly Wulandari, Lavenia, Maryatul Padila, Teni Utami, Nurasari, Bella Puji Amanda, Mutia Ningrum serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palembang yang telah memberikan izin penelitian

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua atas terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan membangun sangat diharapkan baik dari pembaca maupun dari berbagai pihak agar kedepannya lebih sempurna dalam penulisan skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Palembang, Agustus 2023

PIPINTASARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Pustaka	16
1. Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
a. Pengertian Pengawasan.....	16
b. Pengukuran Pengawasan.....	17
2. Akuntabilitas.....	Error! Bookmark not defined.
a. Pengertian Akuntabilitas.....	20
b. Pengukuran Akuntabilitas.....	23
3. Ketepatan Waktu	27
a. Pengertian Ketepatan Waktu	27
b. Pengukuran Ketepatan Waktu	30
4. Transparansi.....	Error! Bookmark not defined.
a. Pengertian Transparansi.....	33
b. Pengukuran Transparansi.....	34
5. Kinerja BPKAD.....	Error! Bookmark not defined.
a. Pengertian Kinerja BPKAD.....	35
b. Pengukuran Kinerja BPKAD.....	37

B. Kerangka Pemikiran	41
1. Pengaruh pengawasan terhadap kinerja BPKAD	41
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja BPKAD	42
3. Pengaruh ketepatan waktu terhadap kinerja BPKAD.....	42
4. Pengaruh transparansi terhadap kinerja BPKAD	44
C. Hipotesis	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Operasionalisasi Variabel	47
D. Populasi Dan Sampel.....	49
E. Data Yang Diperlukan	50
F. Metode Pengumpulan data	51
G. Pengujian Data.....	52
H. Teknik Analisis	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Hasil Penelitian	59
1. Tingkat pengembalian kuesioner	69
2. Profil Responden.....	60
3. Hasil pengujian data.....	61
a. Uji Validitas	61
b. Uji Reliabilitas	65
4. Analisis Data Deskriptif	66
B. Pembahasan.....	75
1. Pengaruh pengawasan terhadap kinerja BPKAD	75
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja BPKAD	77
3. Pengaruh ketepatan waktu terhadap kinerja BPKAD.....	79
4. Pengaruh transparansi terhadap kinerja BPKAD	81
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	84
A. Simpulan	84

B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar IV. 1 Uji Heterokedesitas	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Survei Pendahuluan	12
Tabel III. 1 Operasional Variabel	47
Tabel III. 2 Populasi dan sampel	49
Tabel IV. 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	59
Tabel IV. 2 Propile Responden	60
Tabel IV. 3 Hasil Uji Validitas Pengawasan.....	62
Tabel IV. 4 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas	63
Tabel IV. 5 Hasil Uji Validitas Ketepatan Waktu.....	63
Tabel IV. 6 Hasil Uji Validitas Transparasi Keuangan.....	64
Tabel IV. 7 Hasil Uji Validitas Kinerja.....	65
Tabel IV. 8 Hasil Uji Reabilitas	66
Tabel IV. 9 Hasil Uji Deskriptif Pervariabel.....	67
Tabel IV. 10 Hasil Uji Stastitik Deskriptif Variabel	68
Tabel IV. 11 Hasil Uji Normalitas Data.....	69
Tabel IV. 12 Hasil Uji Multikolineritas	70
Tabel IV. 13 Hasil Uji Regresilinier Berganda	72
Tabel IV. 14 Hasil Uji Koofesiendeterminasi	73
Tabel IV. 15 Hasil Uji t (Uji parsial)	74

ABSTRAK

Pipintasari / 222019149 / 2023 / Pengaruh, Pengawasan, Akuntabilitas, Ketepatan Waktu dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja BPKAD Kota Palembang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial Pengaruh, Pengawasan, Akuntabilitas, Ketepatan Waktu dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja BPKAD Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Variabel yang digunakan yaitu pengawasan, akuntabilitas, ketepatan waktu, transparansi keuangan dan kinerja BPKAD. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 91 responden. Sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh. Data yang digunakan adalah data primer serta Pengujian data yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas dan heterokedasitas) dan analisis regresi linier berganda (koefisien determinasi dan uji t). Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan program komputer statistik SPSS versi 25. Hasil Penelitian berdasarkan data yang kembali dan diolah sebanyak 70 responden semuanya valid dan reliabel. Analisis statistik deskriptif per variabel dan per indikator menunjukkan bahwa nilai dominannya Tinggi. Statistik inferensial yaitu uji asumsi klasik menunjukkan bahwa hasil nilai residualnya berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas dan heterokedasitas. Pada uji regresi linier berganda menunjukkan jika variabel pengawasan, akuntabilitas, ketepatan waktu dan transparansi keuangan dianggap konstan maka kinerja BPKAD akan meningkat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa pengawasan, akuntabilitas, ketepatan waktu dan transparansi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja BPKAD Kota Palembang.

Kata Kunci: Pengawasan, Akuntabilitas, Ketepatan Waktu, Transparansi Keuangan, Kinerja.

ABSTRACT

Pipintasari / 222019149 / 2023 / Influence, Supervision, Accountability, Timeliness and Financial Transparency on the Performance of BPKAD Palembang City.

This research aims to partially determine the influence, supervision, accountability, timeliness and financial transparency on the performance of BPKAD Palembang City. The type of research used is associative research. The variables used are supervision, accountability, timeliness, financial transparency and BPKAD performance. The population in this study was 91 respondents. The sample used is a saturated sample. The data used is primary data and the data used is validity and reliability testing. The data analysis techniques used are descriptive statistics and inferential statistics, namely classical assumption tests (normality, multicollinearity and heteroscedasticity tests) and multiple linear regression analysis (coefficient of determination and t test). The analysis technique in this research uses the SPSS version 25 statistical computer program. The research results are based on data returned and processed by 70 respondents, all of which are valid and reliable. Descriptive statistical analysis per variable and per indicator shows that the dominant value is medium. Inferential statistics, namely the classic assumption test, shows that the residual values are normally distributed, multicollinearity and heteroscedasticity do not occur. The multiple linear regression test shows that if the variables of supervision, accountability, timeliness and financial transparency are considered constant then BPKAD's performance will increase. The results of this research can be partially concluded (t test) showing that supervision, accountability, timeliness and financial transparency have a significant effect on the performance of the Palembang City BPKAD.

Keywords: Supervision, Accountability, Timeliness, Financial Transparency, Performance.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang dalam suatu instansi pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan instansi pemerintah secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika. (Sofyan, 2013).

Kinerja pemerintah daerah dalam lingkup organisasi merupakan hasil kerja yang di capai oleh seseorang atau kelompok orang didalam suatu organisasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang bersangkutan secara illegal dan tidak melanggar hukum serta sesuai denagan moral dan etika. Mahmudi (2010) mengatakan bahwa suatu kinerja diartikan sebagai suatu konstruksi yang bersifat multidimensional serta pengukuranya sangat bergantung pada,

Menurut Mashun (2006:25) kriteria kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi mungkin tidak dapat diketahui apabila tidak ada tolak ukur yang berupa tujuan atau target. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program berhasil tidaknya diperlukan pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara

dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ihyaul,2017):20).

Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, ketepatan waktu, akuntabilitas, dan transparansi, memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat.

Otonomi daerah telah menerapkan tata Kelola *Good Governance*, pemerintah daerah yang baik dalam mewujudkan akuntabilitas publik harus menerapkan adanya suatu pengawasan merupakan unsur terpenting dalam sebuah proses manajemen pemerintah, memiliki peranan yang strategis untuk mencapai terwujudnya akuntabilitas publik dalam sebuah instansi pemerintah. Disamping sebagai dampak sebagai dari pemerintahan yang baik itu sendiri terbentuknya pelayanan publik yang baik pula. Seperti halnya akuntabilitas, transparansi juga memiliki peran yang penting dalam hal penyelenggaraan pemerintah karena adanya transparansi maka masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa saja kebijakan yang diambil pemerintah.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik.

Anggrelia Afrida (2016) mengatakan bahwa upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dalam artian andal dan tepat waktu.

Pengawasan pada suatu instansi pada dasarnya mencakup suatu Tindakan agar berjalan sesuai rencana, ketentuan dan undang-undang berlaku (Khoiriah dan Rahayu, 2021). Menurut Julina (2008:72) mengemukakan tentang fungsi pengawasan adalah indentifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Sehingga apabila suatu instansi menerapkan pengawasan yang baik, maka berdampak pada kinerja. Sebab dengan

adanya pengawasan yang baik maka sesuatu pekerjaan akan dapat berjalan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka pekerjaannya itu akan berhasil. Dengan pengawasan yang baik akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat yang baik. Pengawasan keuangan instansi pemerintah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang -undangan yang berlaku.

T. Hani Handoko (2018:359) mengatakan pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan, langkah proses pengawasan adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.

Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Hafidhuddin, 2012:34). Hal tersebut memiliki arti bahwa pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek

pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu untuk hak untuk tahu, untuk diberi informasi, dan hak untuk di dengar aspirasinya. Salah satu prinsip keuangann daerah yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu: 1) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya, 2) aspek pengelolaan (sterwarship) keuangan daerah secara abik, perlindungan asset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik (Mardiasmo, 2016).

Tiwinarni (2017:18) mengatakan akuntabilitas publik yaitu mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Setiana dan Yuliana (2017:206) mengatakan akuntanbilitas adalah kewajiban pemegang Amanah/agent kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab

kepada pihak memberi Amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Menurut Poae dan Saerang (2013) mengatakan akuntabilitas mengandung pertanggungjawaban, baik orang-orang maupun badan badan yang dipilih atas pilihan-pilihanya dan tindakanya.

Bastian (2017:385) mengatakan akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Suwardjono (2011:170) mengatakan ketepatan *waktu (timeliness)* merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Hendriksen & Breda (2012:145) ketepatan waktu adalah Batasan penting apad publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan, dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan dengan secepat mungkin untuk menjamin tersedianya informasi sekarang di tangan pemakai.

Menurut Chairiri & Ghozali (2014), mendefinisikan ketepatan waktu (*timelines*) merupakan sebuah informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan dan sebelum informasi tersebut telah kehilangan kemampuanya untuk mempengaruhi sebuah keputusan. Dan informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil

masa lalu dan kejadian masa kini, serta informasi tersebut harus tepat waktu untuk pengguna informasi dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu juga menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan suatu instansi pada gilirannya mungkin mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatan waktu ada dua cara, yaitu: (1) ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, dan (2) ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relative atas tanggal pelaporan yang diharapkan.

Ketepatan waktu dalam hal ini merupakan kesesuaian antara waktu yang dihabiskan dalam mengerjakan tugas dengan target waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ketepatan waktu sangat diperhatikan agar tidak mengganggu pekerjaan atau yang lainnya. Ketepatan waktu sangat diperhatikan dalam suatu organisasi, karena menyangkut kepercayaan dari pelanggan atau pengguna. Pegawai yang menjalankan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan akan membuat organisasi mampu berkembang karena pengguna telah mempercayai organisasi berdasarkan ketepatan waktu dalam pelayanan (Azyan dkk, 2019).

Salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas pelaporan keuangan adalah ketepatan waktu. Rentang waktu antara tenggal Ketika informasi keuangan yang dilaporkan (Sulistyo, 2010). Laporan keuangan harus memiliki empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi pemakaiannya.

Karakteristik tersebut yaitu dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Ketepatan waktu adalah batasan penting pada laporan keuangan, ketepatan waktu juga dapat menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan/instansi pemerintahan yang akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat berdampak buruk bagi perusahaan maupun instansi pemerintahan.

Pengawasan dan ketepatan waktu. mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka. (Nazuwir, 2018).

Setiana dan Yuliani (2017:206) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat pada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Mahmudi (2016:17) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemaku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor

pablik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.

Hasil Penelitian sejenis sebelumnya ini pernah dilakukan oleh Fifit dan Nadirsyah (2016) hasil penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Risdhayanti, dkk (2016) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Sama halnya dengan penelitian dari Hari dan Muhammad (2016) yang menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian dari Indah dkk (2017) menunjukkan bahwa ketepatan waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Wandari dkk (2015) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Penelitian dari Nopriansyah, dkk (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, namun berbeda dari Penelitian Shinta, dkk (2017) yang

menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan di dinas pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian dari Nopriansyah, dkk (2016) menunjukkan bahwa transparansi memiliki tidak berpengaruh tetapi signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan penelitian dari Lucy, dkk (2014) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dito Aditia Darma Nasution (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah provinsi Sumatra utara sedangkan transparansi dan ketepatan waktu tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta dkk (2017) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja pelayanan sedangkan transparansi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pelayanan.

Terdapat fenomena umum mengenai pengawasan, akuntabilitas, ketepatan waktu dan transparansi yang terjadi di BPKAD Kota Palembang. Pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih kurang efektif dan efisien yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dana, sehingga menyebabkan kerugian negara atas kasus korupsi pengadaan lift kantor BPKAD Palembang. Hal ini mulai terungkap saat dilakukan pengujian oleh saksi. Lift yang seharusnya dipasang adalah produk Jerman,

namun yang terpasang diketahui lift produk asal China (Detik News.com). Mengindikasikan bahwa dalam proses penggunaan dana, tidak ada pertanggungjawaban atau akuntabilitas dan transparansi yang jelas yang menyebabkan pengawasan keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja BPKAD semakin melemah.

Laporan keuangan pemerintahan masih belum seluruhnya memenuhi kriteria ketepatan waktu. Padahal saat ini pemerintah menginginkan agar laporan keuangan baik pusat daerah disajikan secara andal dan tepat waktu. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelolaan keuangan negara untuk menyampaikan laporan keuangan dengan cangkupan yang lebih luas dalam artian andal dan tepat waktu (<https://news.detik.com>).

Ketepatan waktu di suatu instansi pemerintahan sangatlah penting, karena dengan ketepatan waktu sebuah organisasi dapat mencapai keberhasilan yang maksimal. Ketepatan waktu harus dinyatakan pada awal yang ditetapkan. Dalam ketepatan waktu memberikan informasi kepada masyarakat sangatlah penting karena apabila sebuah informasi disampaikan tidak tepat waktu maka informasi tersebut tidak lagi relevan

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah adalah buruknya kinerja pelayanan publik. Keluhan masyarakat beberapa

tahun terakhir yang berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik yang menduduki peringkat pertama masih keluhan mengenai kinerja pemerintah daerah (<https://koransn>).

Tabel 1.1
Hasil Survei Pendahuluan

Nama Responden	Fenomena yang diterima
Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palembang, Jl. Sekanak. No, 42,22, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113.	Berdasarkan Survey Di BPKAD mengatakan: 1. Pengawasan rencana kegiatan dengan hasil kerja masih belum berjalan dengan baik karena rencana awal kerja kegiatan dengan hasil kerja tersebut terkadang berbeda. Hal ini pernah terjadi beberapa tahun lalu pengadaan lift kantor BPKAD Kota Palembang sudah terjadi penyimpangan dana dan menyebabkan spesifikasi lift tidak sesuai dimana lift yang seharusnya dipasang adalah produk jerman namun yang dipasang diketahui produk china. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan kontrol perilaku 2. Akuntabilitas keterbukaan aparatur atau pegawai BPKAD masih belum berjalan dengan baik karena pelayanan informasi publik masih belum bersifat terbuka atau transparan. Hal ini dapat dikatakan karena dalam mengakses laporan pertanggungjawaban tahunan, masyarakat masih kesulitan mengakses informasi tersebut sehingga membuat masyarakat kurang puas atas pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak pemerintah tersebut 3. Ketepatan waktu BPKAD masih sedikit belum berjalan maksimal karena ada sedikit beberapa pegawai dalam menyelesaikan tugasnya terkadang tidak pada awal waktu yang dinyatakan, akan tetapi pegawai BPKAD tetap menyelesaikan tugasnya dengan baik dan berusaha memaksimalkan hasilnya 4. Penyelenggaraan transparansi, masih belum berjalan maksimal dan kesulitan dalam mengakses informasi laporan keuangan yang diharapkan. Dan memberikan informasi terkadang tidak tepat waktu sehingga informasi tersebut tidak lagi akurat dan relevan. BPKAD telah memberikan informasi kepada masyarakat yang bisa di akses akan tetapi informasi tersebut tidak lengkap dan di jelaskan hanya sedikit. Hal ini menyebabkan pengguna informasi kesulitan memperoleh informasi yang jelas dan akurat.

Berdasarkan tabel diatas informasi yang diperoleh dari survei pendahuluan yang dilakukan sebelumnya melalui wawancara beberapa pegawai BPKAD Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa sistem yang terjadi masih kurang maksimal yakni seperti sistem pengawasan, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan transparansi karena kinerja masih belum cukup baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ” **Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, Ketepatan Waktu dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya permasalahan dan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengawasan keuangan terhadap kinerja BPKAD?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap kinerja BPKAD?
3. Bagaimana pengaruh Ketepatan Waktu terhadap kinerja BPKAD?
4. bagaimana pengaruh transparansi keuangan terhadap kinerja BPKAD?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas,maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan terhadap kinerja BPKAD.

2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap kinerja BPKAD.
3. Untuk mengetahui pengaruh ketepatan waktu terhadap kinerja BPKAD.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi keuangan terhadap kinerja BPKAD.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengawasan, akuntabilitas dan partisipasi keuangan serta kinerja instansi, selain itu penelitian ini untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu Akuntansi Sektor Publik yang sudah ditempuh selama kuliah.

2. Bagi BPKAD Kota Palembang

Diharapkan menjadi masukan dan manfaat bagi pemerintah daerah agar lebih memperhatikan kinerja pegawai dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Corporate Government*).

3. Bagi Almamater

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agoes, S., & Ardana. (2009). *Etika Bisnis Dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Afrida, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Dan Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris Di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir) *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 1-18.
- Angger, S. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pusta A
- Arista, D. (2015). *Transparansi Informasi Situ Web Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Makasar.
- Asiati, D. I. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Palembang: NoerFikri Offse.
- Badruzzaman, S., & Ruslina Lisda, S. E. (2018). *Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Bastian. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Satu Pengantar*. Jakarta: Erlanga.
- Baswir, R. (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis*. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 95-109.
- Chabib. (2011). *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Chariri, A., & Ghozali. (2016). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2014). *Teori Akuntansi*. Semarang: Universitas Di Ponogoro.
- Delano, G. F., & Deviani. (2013). *Pengaruh Kapasitas SDM, Pemafaatan Ti, dan Pengawasan Keuangan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan*. *Jurnal WRA*, Vol. 1, No. 1 April 2013, 21-44.

- Effendi, U. (2014). *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2018). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP
STIM YKPN. Purnamasari, G. A. N., Bagia, I. W., & Suwendra, I. W. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Kerja terhadap Kinerja Pegawai. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 9(1), 18-24.
- Handoko, T. Hani. 2013. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara
- Hanafi, M., & Halim, A. (2005). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP
AMP YKPN.
- Handoko, T. H. (2018). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hulmer, & Turner. (2020). *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta: CV Abadi. Indrisari, D., & Nahartyo. (Pontianak). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Illir). *dalam SNAXI*, 23-24.
- <https://koransn.com/2-terdakwa-dugaan-korupsi-lift-bpkad-palembang-divonis-jaksa>.
- <https://news.detik.com/berita/d-4298318/2-terdakwa-korupsi-lift-kantor-pemkot-palembang-diancam-20-tahun-bui>
- <https://news.detik.com/kolom/d-6419394/sulitnta-mengakses-informasi-publik>
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Grafindo Persada.
- Kiri, S. H. P., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik Serta Fungsi Pemeriksaan Inten Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(8).
- Krina, P. (2018). *Indikator Alat Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi Dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumorotomo, W. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kurniawan, A. (2014). *Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis: Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawati, E. (2018). Pengaruh Akuntansi Manajemen, Kualitas Informasi, Efisiensi Biaya Dan Ketepatan Waktu Terhadap Kinerja Keuangan PT. Surya Sukses. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 11(1), 20-33.
- Kusumastuti, L. P. (2014). *Membumikam Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mahmudi. (2017). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY- Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Novita. (2017). Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Pendekatan Value For Money dan Desentralisasi Fiskal Pada Kabupaten/Kota Didaerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam*.
- Poe, & Saerang. (2013). Pengaruh Akuntabilitas dan Aksilibilitnya Terhadap Transpransi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Accountability*, Vol. 2 No. 2, 29-34.
- Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS Pengelolaan data dan Analisis data*. Yogyakarta: Start Up.

- Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sedarmayanti. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen PNS*. Bandung: Refks Aditama.
- Sari, A. D. P. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 2(1), 86-96.
- Setiana, N. D., & Yuliana, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah*, 205-210.
- Siagian, & Sondang, P. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (1995). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulityo, W. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Pada Perusahaan Yang Listing di Bursa Efek Indonesia. (*Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro*).
- Suwardjono. (2011). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Suwardjono. (2011). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Wibowo. (2010). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo .
- Wandari, I. D. N. T., Edy Sujana, S. E., Msi, A. K., ADIPUTRA, I. M. P., SE, S., & Si, M. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Yunita, & Chirtianingrum. (2018). Measurement of Accountability

Management of Village Funds. *Jurnal facultas of Economy University of Bangka Belitung*, 100-102.